

LANSKAP MODERASI KEAGAMAAN SANTRI, REFLEKSI POLA PENDIDIKAN PESANTREN

Saifudin Asrori

UIN Syarif hidayatullah Jakarta

Email: saifudin.asrori@uinjkt.ac.id

Abstract. *Positioning a pesantren in a series of continuum lines between liberals and conservatives, based on critical interpretations of religious texts as opposed to rigid and liberal understandings, is a misunderstanding of the landscape of religious moderation. This article elaborates on the complex process of Islamic boarding school understanding and practice in the midst of a religious shift towards a conservative direction. Through literature study based on a reading model based on *masalah* on religious texts and the essence of religious texts based on the plurality of views of the schools of thought conducted by the Pondok Modern Darussalam Gontor. This article concludes that through preserving values through *Pancajawa* and the motto of the pesantren, the integration between formal and informal curricula places Gontor's position as a moderate educational institution.*

Keywords: *Islamic Moderation, Maslah, curriculum, PMDG, Indonesia*

Abstrak. Memposisikan sebuah pesantren dalam rangkaian garis kontinum antara liberal dan konservatif, berdasarkan penafsiran kritis atas teks keagamaan sebagai lawan pemahaman kaku dan liberal, menjadi salah upaya memahami lanskap moderasi keagamaan. Artikel ini mengelaborasi proses kompleks pemahaman dan praktik keagamaan pesantren di tengah pergeseran keagamaan ke arah konservatif. Melalui studi pustaka berdasarkan model pembacaan berdasarkan *masalah* atas teks-teks keagamaan dan inti dari teks keagamaan berdasarkan pluralitas pandangan madzhab yang dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor. Artikel ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai dilestarikan melalui *pancajiwa* dan motto pesantren, intergrasi antara kurikulum formal dan informal menempatkan posisi Gontor sebagai lembaga pendidikan yang moderat.

Kata Kunci: Moderasi Islam; *masalah*; kurikulum, PMDG; Indonesia.

Pendahuluan

Dalam dua dasarwarasa terakhir, peningkatan keyakinan dan praktik keagamaan yang diamalkan oleh kelompok-kelompok Islam transnasional seperti Salafy, Jama'ah Tabliq, Ikhwan Muslim dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terbukti mampu menarik banyak simpati pemuda dan kalangan Muslim perkotaan Indonesia (Jahroni, 2015). Gagasan kembali ke al-Qur'an dan Hadist, praktik keagamaan sebagaimana dicontohkan Nabi dan para Sahabat, pendirian khilafah Islamiyah, persaudaraan Muslim, dan penerapan syari'at Islam menjadi wacana perdebatan dengan kelompok-kelompok Islam arus utama, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama' (NU). Selain itu, massifikasi kampanye ajaran Islam transnasional melalui lembaga pendidikan Islam, juga menjadi tantangan bagi keberadaan pesantren dan madrasah di mana telah memiliki sejarah panjang dan mengakar dalam pembentukan karakter Muslim Indonesia yang dikenal ramah, dan toleran. Sayangnya terjadi pergeseran keagamaan ke arah konservatif. Van Bruinessen (2011) mengidentifikasi tiga kemungkinan penyebab tumbuhnya tren konservatisme agama di Indonesia: mayoritas Muslim Indonesia sebenarnya konservatif. Para pendukung Islam moderat mengubah agenda mereka menjadi politik dan karenanya, pada akhir pekan, promosi Islam moderat. Meningkatnya pengaruh negara-negara timur tengah yang mempromosikan ideologi Islam konservatif. Artikel ini mengelaborasi proses kompleks pemahaman dan praktik keagamaan pesantren di tengah pergeseran keagamaan ke arah konservatif (*conservative turn*) (Bruinessen, 2013).

Pola pendidikan pesantren telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dan reformasi kemasyarakatan. Melalui proses pengajaran, di mana kyai sebagai figur utama dan penggunaan 'kitab kuning', gagasan Islam tradisional mewarnai masa-masa awal tumbuhnya kesadaran sebagai bangsa dan Negara (Dhofier, 2011; Lukens-Bull, 1997). Ketika pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan dan modernisasi masyarakat, terjadi kebangkitan kelompok Muslim yang di sebut "kelas menengah santri baru", berlangsung sejalan dengan modernisasi yang terjadi dalam lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren. Kemudian pada era demokratisasi, dunia pendidikan Islam mengalami pertumbuhan dan

perkembangan dalam beragam kelembagaan dan corak keagamaan. Sebagian besar pesantren tetap *istiqomah* dalam mempertahankan corak keagamaan yang moderat, diakui sebagai pondasi berkembangnya masyarakat sipil dan pembentukan identitas sosial-politik masyarakat Indonesia yang 'khas', ramah, moderat, dan toleran (Azra, 2007). Karakter Muslim yang berbeda dengan kawasan lainnya, khususnya Timur-Tengah yang merupakan poros dunia Islam. Sebagian kecil pesantren melakukan adopsi dan adaptasi corak keagamaan transnasional.

Meski istilah moderasi keagamaan masih menjadi perdebatan dalam lanskap pemahaman dan praktik keagamaan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memosisikan sebuah pesantren dalam spectrum kontinum antara liberal dan konservatif, berdasarkan penafsiran kritis atas teks keagamaan sebagai lawan pemahaman literal dan kaku (Bayat, 2013). Selain itu, kesediaan untuk mengadopsi kondisi sosial-politik lokal tertentu, memungkinkan pandangan pluralistik dalam mengikuti beberapa aliran-aliran madzhab dari pada hanya *taqlid* pada satu pandangan tertentu (Schwedler, 2011). Menurut Azyumardi Azra (2014), karakteristik moderasi keagamaan Muslim Indonesia adalah pengakuan atas demokrasi sebagai sistem kenegaraan sejak kemerdekaan, mayoritas penduduk berpartisipasi dalam seluruh rangkaian proses demokrasi dan peningkatan partisipasi perempuan, mengidentifikasi diri berafiliasi pada organisasi keagamaan dan kuatnya jalinan masyarakat sipil.

Dunia Pesantren telah mengalami perubahan aspek kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2016-2017, tercatat sebanyak 29.861 lembaga pesantren dengan jumlah santri 3,85 juta yang tersebar di 34 Provinsi. Pertumbuhan dunia pendidikan Islam, Pesantren dan Madrasah, berjalan seiring dengan perkembangan orientasi, pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat Muslim Indonesia¹. Setiap organisasi keagamaan mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan orientasi keagamaannya. Ada lima model lembaga pendidikan Islam, yaitu: Pesantren Tradisional atau *Salafiyah*, Pesantren Reformis, Pondok Modern, Pesantren Salafi, dan Pesantren Independen. Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan telah diakui

¹ Nahdlatul Ulama' (NU) (64.59%), Muhammadiyah (1.63%), Persis (0.43%), Al-Jami'ah al Wasliyah Al-Washiliyah (1.04%), Partai Islam (0.41%), Matla'ul Anwar (0,29), Al-Khairat (0.44%), Nahdlatul Wathon

(0.86), DDII (0.45), Perti (1.21), LDII (0.09%), GUPPI (0.38), Independen (23.13%), Lain-lain (5.06%).

keberadaannya oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Artikel ini berusaha mengelaborasi proses kompleks pemahaman dan praktik keagamaan kalangan santri, melalui kajian pustaka dan pengamatan jalinan keilmuan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Sesudah pendahuluan akan dibahas pemahaman terkait terminologi moderasi keagamaan, dilanjutkan pembahasan tentang nilai dan kurikulum PMDG, dan pembahasan terakhir terkait diskusi proses kompleks penanaman dan pelestarian pemahaman dan praktik keagamaan yang moderat.

Memahami Istilah Moderasi Keagamaan

Terminologi moderasi keagamaan merujuk pada 'posisi tengah' dalam spectrum faham liberal dan konservatif. *Moderate* yang bermakna 1) rata-rata dalam jumlah, intensitas, kualitas, dan lain-lain; tidak ekstrem; 2) pandangan politik yang tidak ekstrem; misalnya pandangan politik yang tidak ekstrem kiri atau ekstrem kanan; 3) menjaga dalam batas-batas yang tidak berlebihan (Kementerian Agama, R. I., 2019). Model pertama adalah pembacaan pada teks-teks keagamaan yang di-wahyu-an untuk kepentingan manusia berdasarkan *masalah* (kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, kepatutuan dan keselarasan) bagi kemasyarakatan. Model pembacaan ini diyakini akan memberikan manfaat bagi yang meyakini teks keagamaan. Pendekatan ini, diakui sebagai pendekatan modernis yang menekankan pada kewajaran, moderat, ramah terhadap kepentingan public (Brown, 2011).

Selain model pembacaan berdasarkan *marsalah*, moderasi keagamaan difahami melalui focus dari posisi tertentu. Melalui pengalihan focus yang mencakup empat mazhab Sunni menentang kekakuan dan kecenderungan eksklusif dari interpretasi kelompok keagamaan yang kaku. Oleh karena itu, letak moderasi keagamaan lembaga Islam terletak pada kemampuannya untuk menangkap pluralitas dalam berbagai posisi Islam, berusaha menghindari taqlid (kepatuhan ketat) pada satu aliran pemikiran. Melalui model pembacaan teks-teks keagamaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perspektif, pemahaman dan praktik keagamaan dalam posisi di tengah-tengah antara dua kutub ekstrem liberal dan ultra-konservatif, selalu bertindak adil dan berimbang dalam beragama.

Dalam tradisi keserajaan Islam, moderasi memiliki padanan dengan istilah *wasathiyyah*. Konsep *wasathiyyah* secara etimologi memiliki dua pengertian besar yaitu: *pertama*, perantara atau penghubung (*interface/al-bainiyyah*) antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. *Kedua*, terbaik, adil, pilihan, dan utama (*superiority/al-khiyâr*). Konsep *wasathiyyah* diartikan sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifraith*), dan tidak terlalu ke kiri (*tafrith*). *Wasathiyyah* juga terkandung makna keadilan (*al-ad*), kemuliaan dan persamaan (*al-musawa*).

Kata '*al-wasathiyyah*' berakar pada kata *al-wasth* (dengan huruf *sin* yang di-*sukûn*-kan) dan *al-wasath* (dengan huruf *sin* yang di-*fathah*-kan) yang keduanya merupakan *mashdâr* (*infinitive*) dari kata kerja (*verb*) *wasatha*. Secara sederhana, pengertian *Wasathiyyah* secara terminologis berangkat dari makna-makna etimologis di atas yang artinya suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim.

Adapun kata *al-wasth* merupakan pola *zharf* yang berarti *baina* (diantara). Sedangkan kata *al-wasathu*, mengandung empat pengertian, yaitu: *pertama*, kata benda (*ism*) yang bermakna posisi pertengahan diantara dua posisi berseberangan. *Kedua*, sebagai kata sifat yang berarti pilihan (*khiyâr*), utama (*afdhal*), dan terbaik (*ajwad*). *Ketiga*, mengandung arti '*adl* (adil). *Keempat*, mengandung arti sesuatu yang berada diantara hal yang baik dan hal yang buruk/netral (*asy-syay'u baina al-jayyid wa ar-rad'i*).

Adapun jika kedua kata di atas diderivasikan, maka pengertiannya akan berkisar pada pengertian adil, utama, pilihan/terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Diantaranya, kata *wasîth* yang berarti *hasîb* dan *sharîf*, seperti perkataan Jauhari: "*fulân wasîth fi qaumihi idzâ kâna ausathuhum nasaban wa arfa'uhum mahallan.*" Dan kata *alwasath* yang berarti *al-mutawassith baina al-mutakhassimaini* (penengah antara dua orang yang berselisih). Demikian pula derivasi-derivasi lainnya, seperti: *at-tawassuth*, *at-tausîth*, dan *wâsithah*.

Pembatasan pengertian *wasathiyyah* pada konsepsi Islam berangkat dari suatu fakta bahwa konsep ini merupakan murni dan orisinal sebuah konsep yang berasal dari Islam dengan segala kandungannya sebagaimana yang ditegaskan Al-Qardhawi. Namun jika konsep ini disepadankan dengan konsep moderasi yang berkembang, maka dalam konteks ini, menurut penulis, setidaknya terdapat dua terminologi yang harus dibedakan, hingga tidak menimbulkan kerancuan persepsi

tentang Islam itu sendiri, yaitu, “*Islam Moderat*” dan “*Moderasi Islam*”.

Untuk terminologi pertama, pada dasarnya term ini tidak pernah dikenal dalam Islam, karena Islam sebagai agama yang telah sempurna, lengkap, dan satu (QS. al-Mâidah [5]: 3, QS. al-Anbiyâ’ [21]: 92, QS. al-Mu’minûn [23]: 52) tidak mengenal kategorisasi apapun dalam hakikatnya. Apakah itu kategorisasi yang lebih bersifat negatif, seperti Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam militan, Islam jihadis, dan lainnya. Maupun kategorisasi yang lebih dianggap bersifat positif seperti Islam progresif, Islam moderat, Islam modernis dan lainnya. Adapun untuk terminologi kedua, umat Islam sepanjang masa telah sepakat bahwa moderasi sebagai padanan kata *wasathiyyah* merupakan salah satu karakteristik maupun cara berfikir yang telah melekat dalam Islam itu sendiri merujuk sumber-sumbernya yang otoritatif. Sedangkan sikap-sikap ekstrimis yang terjadi dalam diri umat Islam, merupakan bagian dari penyimpangan yang harus diluruskan. Sebagaimana yang terjadi pada sekte *khawârij* pada masa Sahabat *ridhwanullah ‘alaih*. Maupun sekte *qadariyyah* dan *jabariyyah* pada masa-masa berikutnya.

Selain itu, tetap harus dibedakan pula Islam sebagai agama dan ajaran, dengan pemeluknya. Sebagai agama dan ajaran, Islam tidak pernah beruba hal. Islam sudah lengkap dan sempurna. Hanya saja, pemahaman pemeluknya terhadap Islam itulah yang berbeda-beda; ada yang lengkap dan tidak; ada yang memahami Islam dari satu aspek, sementara aspek yang lain ditinggalkan, misalnya, Islam hanya dipahami dengan *tasâmuh* (toleransi)-nya saja, sementara ajaran Islam yang lain, yang justru melarang *tasâmuh* tidak dipakai. Dari sini, seolah-olah Islam hanya mengajarkan *tasâmuh* sehingga Islam terkesan permisif. Padahal kenyataannya ada yang boleh ditoleransi, dan ada pula yang tidak. Jadi, tetap harus dipilah antara Islam dan orangnya.

Berangkat dari pengertian-pengertian dasar *wasathiyyah* dalam kamus-kamus bahasa Arab, dapat disimpulkan bahwa konsep *wasathiyyah* secara etimologi memiliki dua pengertian besar yaitu: *pertama*, sebagai kata benda (*ism*) dengan pola *zharf* yang lebih bersifat kongkrit (*hissî*), yaitu sebagai perantara atau penghubung (*interface/al-bainiyyah*) antara dua hal atau dua kondisi atau antara dua sisi berseberangan. *Kedua*, lebih bersifat abstrak (*theoretical*) yang berarti terbaik, adil, pilihan, dan utama (*superiority/al-khiyâr*). Raghîb al-Ashfahani (w. 502 H) mengartikannya sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*)

dan tidak terlalu ke kiri (*tafrîth*), di dalamnya terkandung makna keadilan (*al-‘adl*), kemuliaan, dan persamaan (*al-musawah*).

Menurut al-Qaradhawi, *wasathiyyah* didefinisikan sebagai metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku berdasarkan sikap yang seimbang (*tawazun*) dalam menyikapi dua kondisi perilaku yang memungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan sehingga kondisi sikap yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi komunitas local (Qaradawi, 2010). Sikap moderat selalu mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi Negara. Penerapan sikap moderat dalam beragama membutuhkan pengetahuan atau pemahaman yang benar, emosi yang seimbang dan terkendali, serta kewaspadaan dan kehati-hatian bersinambungan (Shihab, 1999).

Berdasarkan pengertian di atas, moderasi mempunyai makna yang sangat luas, beberapa ahli mencoba merumuskan indikator moderatisme seperti pengakuan terhadap pemerintahan demokratis, dukungan terhadap kebebasan sipil, mampu mengakomodasi peraturan syari’ah dan sekuler, bersedia bekerja melalui lembaga resmi negara; dukungan untuk sistem pemilihan di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing; dan pandangan dunia yang lebih terbuka dan toleran terhadap perspektif alternative. Ringkasnya, moderasi adalah “pergerakan dari pandangan dunia yang relatif tertutup dan kaku ke yang lebih terbuka dan toleran terhadap perspektif alternative (Schwelder, 2006). Muslim Moderat ditandai dengan partisipasi aktif dalam koalisi pemerintahan, dukungan terhadap pemerintahan yang stabil melayani kepentingan individu dan kolektif.

Kebalikan dari sikap keberagamaan yang moderat adalah ekstremisme. Istilah ekstremisme dapat didefinisikan sebagai “gerakan sosial yang bertujuan untuk mempoleh kekuasaan melalui program dan kegiatan politik yang umumnya berbeda dengan program yang didukung oleh otoritas pemerintahan yang sah, dan melakukan pembatasan kebebasan individu atas nama tujuan bersama, membolehkan pembantaian massal terhadap mereka yang sebenarnya atau berpotensi tidak setuju dengan programnya”. (Asrori, 2019).

Kondisi pikiran mereka tidak mentolerir adanya perbedaan. Mereka juga secara positif mendukung penggunaan kekuatan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan

politik, dalam pernyataan publik mereka meskipun mereka tidak begitu jelas dan ambigu mengenai hal ini, terutama ketika mereka masih dalam posisi lemah. Para ekstremis umumnya cenderung memiliki 'pikiran tertutup' yang tidak fleksibel, mengikuti interpretasi mono-kausal yang disederhanakan dari dunia di mana anda berada di pihak mereka atau melawan mereka, ataupun menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi.

Moderasi beragama berada di esensi atau inti ajaran agama, sedangkan ekstremisme radikal merupakan bentuk keterasingan dari agama, baik dalam hal pemikiran maupun praktik. Kondisi keterasingan, dalam konteks ini, berarti bersikap berlebihan dalam satu atau lebih dari esensi agama tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan tentang sebagai penyebab utama ekstremisme radikal, intoleransi, dan interpretasi yang kaku. Menurut Qaradawi strategi yang efektif untuk mencegah pemuda dari terpapar radikalisme dan ekstremisme penanaman nilai-nilai moderasi agama melalui pendidikan Islam (Qaradawi, 2010).

Menjaga Moderasi, Pengalaman PM Darussalam, Gontor

Kehidupan di PM Darussalam, Gontor

Pendiri PMDG berhasil mengidentifikasi karakter pesantren menjadi pancajiwa, yaitu: 1) keikhlasan; 2) kesederhanaan; 3) kemandirian; 4) *ukhuwwah islamiyah*; dan 5) kebebasan (Asrori, 2017). *Pertama*, Jiwa Keikhlasan yakni berbuat sesuatu bukan karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Semua tindakan dilakukan dengan satu-satunya tujuan ibadah. Kiai dengan sukarela mendidik dan asistennya Kiai dengan tulus membantu pendidikan dan siswa yang tulus dididik. *Kedua*, Jiwa kesederhanaan mencerminkan nilai-nilai kekuatan, kemampuan, ketabahan dan kontrol diri dalam menghadapi perjuangan hidup. *Ketiga*, Jiwa Kemandirian yaitu kemampuan untuk membantu diri sendiri adalah senjata ampuh yang disuplai pesantren kepada siswanya. Tidak hanya pendidikan mandiri berarti bahwa siswa dapat belajar dan berlatih mengurus kepentingan mereka sendiri, tetapi sekolah asrama itu sendiri sebagai lembaga pendidikan juga harus dapat mandiri sehingga tidak pernah bergantung pada kehidupannya untuk membantu atau belas kasihan orang lain. *Keempat*, Jiwa Ukhuwah islamiyah yaitu menciptakan kehidupan di sekolah asrama yang dipenuhi dengan suasana persaudaraan yang bersahabat, sehingga semua suka dan duka diterima

bersama dalam jalinan persaudaraan Islam. Tidak ada dinding yang bisa dibuka di antara mereka. Ukhuwah ini tidak hanya selama mereka tinggal di Pondok, tetapi juga mempengaruhi kesatuan umat di komunitas setelah mereka memasuki komunitas. *Kelima*, Jiwa Bebas yaitu bebas dalam berpikir dan berusaha, bebas dalam menentukan masa depan, bebas dalam memilih jalan hidup, dan bebas dari pilihan negatif dari luar, masyarakat. Semangat bebas ini akan menjadikan santri dengan semangat besar dan optimisme dalam menghadapi semua kesulitan.

Penanaman nilai-nilai modern di PM Gontor menjadi bagian integral dalam proses pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren. Sejak pertama kali berdiri, Gontor menamakan dirinya sebagai Pondok Modern yaitu mengintegrasikan dua sistem pendidikan sekaligus, sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan modern. Idealisme, jiwa, dan falsafah hidup berikut sistem asramanya tetap mengacu kepada khazanah dunia pesantren, tetapi penyalenggaraannya dilakukan secara efektif dan efisien yang menjadi kekhasan sistem pendidikan modern. Konsekuensi dari integrasi ini adalah bahwa seluruh kegiatan santri; baik di dalam maupun di luar kelas merupakan kegiatan-kegiatan pendidikan (Zarkasyi, 2005).

Ketika mempertimbangkan sejarah perkembangan Pondok Gontor, teladan dalam bidang ketulusan benar-benar terlihat dalam semua gerakan dan tindakan Pengasuh. Di sektor material, misalnya, sampai usia Pondok 10, Pondok tidak pernah menarik sepeser pun dari siswanya. Semuanya dibantu oleh pengasuh. Dari dulu sampai sekarang para Kyai Pemimpin Pondok tidak pernah menerima beasiswa dari Pondok, malah mereka telah banyak berkorban untuk Pondok. Keteladanan dalam hal keikhlasan juga dilakukan melalui pewakafan Pondok oleh para pendirinya pada 28 R. Awwal 1378/12 Oktober 1958. Sejak saat itu, para pendiri telah melepaskan kepemilikan pribadinya atas Pondok. Dengan pewakafan itu seluruh keturunan para pendiri tidak berhak lagi atas harta wakaf tersebut. K.H. Imam Zarkasyi menjelaskan bahwa semua saja harus benar-benar memahami pewakafan ini, terutama anak-anak para wakif sendiri: anak cucunya, anak cucu Pak Sahal, anak cucu Pak Fannani. Ia kemudian berkata:

"Kalau seandainya anak saya nanti tidak atau kurang mengakui lepas tanggalnya hak-hak milik ini, sehingga merasa punya dan tetap akan menguasai karena keturunannya ini, berarti tidak mengesahkan wakaf ayahnya, atau membatalkan amal jariyah ayahnya.

Kepada anak-anak saya, anak Timurti kami nasehatkan, untuk tidak bertindak atau merasa demikian, karena itu berarti tidak mengesahkan wakaf orang tuanya. Kasihanilah orang tuamu.” (Zarkashi, 2005)

Para pengurus menjadi teladan dalam pendidikan keikhlasan. Mereka bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan energi untuk merawat organisasi atau apa pun yang diamanatkan kepada mereka. Mereka tidak menerima gaji dari Pondok. Para Kyai Pimpinan Pondok tidak menerima gaji karena kedudukannya, direktur KMI dan ketua-ketua lembaga yang lain juga tidak digaji karena jabatan mereka, para guru yang mengelola unit-unit usaha juga demikian. Tidak ada tunjangan posisi Kyai, tunjangan jabatan direktur, tunjangan ketua kantor, dan sebagainya. Demikian juga para administrator pada resolusi santri; OPPM maupun Gerakan Pramuka tidak menerima ketidakseimbangan materi karena posisi yang mereka tempati.

Selain itu, penanaman nilai demokrasi misalnya, diajarkan melalui proses berorganisasi. Kegiatan organisasi ini merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari siswa, alasan berorganisasi di Pondok ini. Di dalam asrama, santri diajar untuk bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, KH. Imam Zarkasyi berpesan:

“Setiap datang pelajar baru, berarti bertambah anggota yang turut serta bertanggungjawab terhadap kebersamaan Pondok. Pembayaran yang diambil itu hanya sebagai iuran untuk Pondok dan sekolah, bukan berarti sebagai sewa atau upah. Uang itu kemudian digunakan untuk kepentingan dalam pondok, seperti memperbaiki pondokan yang telah didirikan sebelumnya oleh santri-santri terdahulu. Inilah yang dimaksud zelf berdruping systeem, artinya sama-sama membayar iuran, sama-sama memakai” (Zarkashi, 2005).

Secara struktural organisasi asrama ini berada di bawah OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern) yang merupakan pengurus pusat kegiatan santri. Jika OPPM ditangani oleh santri kelas VI, organisasi asrama ini diurus oleh santri kelas V dengan dibantu oleh santri-santri di kelas bawahnya (kelas IV dan III). Pelaksana OPPM adalah siswa yang dipilih secara formal (kelas VI). Pemilihan Ketua dan Manajemen Organisasi ini diadakan sekali. Di akhir setiap masa jabatan, manajemen organisasi ini melaporkan kegiatan yang disepakati sambil berdiskusi di depan semua siswa dan guru serta para pemimpin lembaga dan para Pemimpin

Pondok. Setelah laporan pertanggungjawaban diadakan, penyerahan posisi dari manajemen lama ke manajemen yang baru terpilih. Setelah meletakkan masa pengurusannya, mantan pengurus dari siswa akhir tersebut kembali menjadi santri biasa.

Kemudian pendidikan toleransi, di Pondok Gontor melekat pada proses Pesantren di asrama tidak permanen, artinya santri tidak tinggal di satu kamar, atau satu asrama, selama dia tinggal di pesantren, seperti yang umumnya terjadi di pesantren lain. Setiap tahun asrama dipindahkan, siswa berpindah dari satu asrama ke asrama lain, dan setiap satu semester mereka memindahkan kamar di satu asrama (Asrori, 2011). Ini memberikan variasi dalam kehidupan siswa. Ini juga berguna agar siswa mengenal lebih banyak teman dan mengenal berbagai tradisi dan budaya siswa lainnya. Pesantren tidak didasarkan pada asal atau etnisnya sebagaimana umumnya terjadi di pesantren lain. Tempat ini harus lebih cocok untuk siswa. Ketentuannya, tidak boleh lebih dari 3 siswa diterima dari satu area yang menerima kamar yang sama. Ini mendukung untuk melebur semangat regional menjadi semangat yang lebih universal. Selain itu, siswa juga belajar tentang kehidupan komunitas yang lebih luas, nasional, bahkan internasional dengan kehadiran siswa yang berasal dari luar negeri.

Antara santri baru dan lama ditempatkan di tempat yang berbeda. Santri baru menempati asrama khusus untuk santri baru. Pemilihan pengurusnya pun melalui seleksi ketat. Karena mereka inilah yang bertanggungjawab langsung membina kehidupan santri baru itu, dari pagi sampai pagi lagi, selain jam-jam masuk kelas. Merekalah yang pertama kali mengenalkan kehidupan Pondok dengan segala dinamika. Segalanya harus dilakukan dengan prima agar prosesnya kemudian benar-benar lancar. Ada pepatah yang sering disampaikan mengenai hal ini *“well begun is half done”* (permulaan yang baik itu setengah pekerjaan).

Penempatan santri di asrama dibagi menjadi dua kategori, santri *kibâr* (besar/dewasa) dan santri *sighâr* (kecil/anak-anak). Pengklasifikasian ini didasarkan pada postur tubuh dan juga usia. Biasanya, tamatan SD digolongkan pada Sighar, dan tamatan SMP ke atas masuk golongan Kibar, tetapi terkadang ada juga tamatan SMP yang ditempatkan di asrama Sighar. Santri Kibar menempati unit-unit asrama untuk Kibar, demikian pula santri Sighar. Ini untuk memudahkan proses pendidikan mengingat adanya perbedaan dalam pendekatan untuk

mendidik pada usia yang berbeda itu. Pengaturan model ini juga memberikan kesempatan lebar untuk melatih dedikasi dan loyalitas kehidupan antar santri sendiri dan merupakan bagian dari proses pelatihan kecakapan intelektual, *mental attitude*, spiritual dan sosial, sekaligus merupakan proses kaderisasi kepemimpinan.

Kurikulum Pendidikan

PMDG menyediakan sistem pendidikan program reguler dan intensif. Program reguler untuk lulusan Sekolah Dasar atau *Madrasah Ibtida'iyah*, dengan masa studi 6 tahun, yang diambil secara berurutan dari kelas 1 hingga 6 dan program Intensif di Sekolah Menengah Pertama atau *Madrasah Tsanawiyah* dan di atasnya, diambil selama 4 tahun, oleh urutan 1-3-5-6 kelas. Proses pendidikan dilakukan melalui integrasi keunggulan sistem pesantren dan Madrasah. Keunggulan pesantren pada sistem asrama dan pendidikan sikap mental. Sementara Madrasah memiliki kelebihan metodologi dan manajemen yang efektif dan efisien serta luasnya wawasan intelektual. Di PMDG, proses kelembagaan dan organisasi, manajemen, kurikulum, dan metode pendidikan disebut dengan *Kulliyat al-Mu'allimîn al-Islâmiyyah* (KMI).

Modernisasi institusi dan organisasi dilakukan melalui pembentukan Dewan Wakaf pada tahun 1958. Sejak itu, PMDG tidak lagi menjadi milik Kyai atau keluarga pendiri. Namun, milik umat Islam. Badan *Wakaf*, mempunyai tugas memilih kyai. Sedangkan tugas kyai, secara umum adalah, (1) menjalankan pendidikan dan pengajaran, (2) menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, (3) mengembangkan properti wakaf dan penggalangan dana, (4) mempersiapkan generasi baru, dan (5) menjaga kesejahteraan guru. Dalam menjanjani tugasnya, kyai dibantu oleh bagian pengasuhan santri dan bagian *Kulliyat al-Mu'allimîn al-Islâmiyyah* (KMI).

Terkait aspek Kurikulum. PMDG tidak memisahkan kurikulum formal dan informal. Kurikulum di susun secara integral dalam kurikulum unik, yang dikenal sebagai kurikulum KMI. Kurikulum juga selalu ditinjau dan diperbarui dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan dan perubahan. Prinsip-prinsip perubahan kurikulum melalui *al-muhâfazah 'alâ al-qadîm al-sâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-aslah* (mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil inovasi baru dengan lebih baik). Pembaruan kurikulum, dilakukan dengan mengintegrasikan keduanya sehingga pengajaran

ilmu dan teknologi tidak lepas dari nilai-nilai dasar dan agama dan sebaliknya mengajarkan ilmu-ilmu agama yang dikembangkan sejalan dengan pengembangan keilmuan umum.

Intergrasi juga dalam kurikulum intra dan ekstra sekolah. Kurikulum pendidikan di pesantren mencakup semua kegiatan dalam berbagai bentuknya, yang semuanya merupakan bagian integral dari kurikulum yang mengatur seluruh kehidupan santri. Selain itu, kurikulum disampaikan dengan berbagai metode atau mobil, prinsip-prinsip dasar pondok, "*al-tarîqah ahammu min al-mâddah, al-mudarris ahammu min al-tarîqah, wa-r-wah al-mudarris.*" (Metode pengajaran lebih penting daripada pelajaran yang diajarkan, namun guru lebih penting daripada metode, faktor pribadi guru adalah yang paling penting, dan itu adalah semangat guru).

Beberapa mata pelajaran di PMDG adalah al-Qur'an, Tafsir, al-Hadîts, Mustalah al-Hadîst, al-'Aqâ'id, Fiqh, Ushûl Fiqh, Tajwid. Beberapa kitab Tafsir yang dipelajari adalah Tafsir Madrasi dan ringkasan al-Manâr. Selai itu, pelajaran hadist digunakan Bulûgh al-Marâm dan Subul al-Salâm. Untuk memahami ilmu Hadits, seperti Mustalah al-Hadîst, para siswa membaca Taysîr Mustalah al-Hadîst. Untuk subjek Fiqh, al-Fiqh al-Wâdiah. Kitab Bidâyah al-Mujtahid yang ditulis oleh Ibnu Rusyd juga dipelajari untuk memahami perdebatan dalam *madzhab* Islam.

Selain itu, dalam materi pelajaran pengetahuan agama (*al-'ulûm al-syar'iyah*) diintegrasikan dengan pengetahuan rasional (*al-'ulûm al-'aqliyyah*). Materi pelajaran berhitung dan matematika, misalnya, digunakan untuk mendukung ilmu pewarisan (*farâid*), ekonomi atau organisasi. Subjek kosmografi digunakan untuk memahami 'ilm al-falaq. Singkatnya, tidak ada dualisme dalam kurikulum di proses pendidikan di PMDG.

Diskusi: Menjaga Moderasi Keagamaan

PMDG merancang kegiatan santri dengan tujuan menanamkan pendidikan karakter. Strategi pembelajaran untuk menanamkan keterampilan mental adalah "belajar dengan melakukan". Dalam sistem pesantren, strategi semacam itu dapat dilakukan dengan melibatkan semua siswa dalam kegiatan di luar sekolah atau dengan kata lain, dengan mengajar mereka melalui pendidikan informal dan non-formal. Hubungan antara bentuk-bentuk agama publik dan pribadi sebenarnya lebih kompleks dan paradoks.

Zuhdi, membahas tentang tantangan pendidikan Islam dalam mengajarkan nilai-nilai Islam yang toleran dan moderat ditengah meningkatnya kecenderungan keagamaan ke arah yang lebih konservatif. Melalui kajian tentang kurikulum pendidikan agama di madrasah dan sekolah Umum, serta persepsi guru terkait isu hubungan antara Islam dan Negara, penerapan Syari'at Islam, Kelompok Minoritas, Gender dan Media. Artikel ini menyimpulkan bahwa kurikulum pendidikan Islam telah di desain berdasarkan keinginan dan kepetingan penguatan keagamaan masyarakat yang plural dan moderat, namun ada beberapa isu terkait khilafah dan jihad masih mengandung nilai-nilai radikal, serta ada beberapa buku ajar pendidikan keagamaan yang dinilai membingungkan. Sedangkan terkait dengan persepsi guru tentang isu-isu di atas disimpulkan bahwa masih ditemukan perbedaan persepsi dalam isu implementasi syari'ah Islam, khilafah, hubungan dengan minoras Muslim, pengucapan hari-hari raya keagamaan, dan kepemimpinan non-Muslim. Kajian ini menyimpulkan, meski kurikulum pendidikan Islam telah di desain sesuai prinsip-prinsip moderat Islam dan perubahan masyarakat. Namun, keberadaan dan kemampuan guru dalam mengajarkan kurikulum tersebut masih diperlukan penguatan dan pengayaan, khususnya berkaitan dengan meningkatkan corak keberagaman yang konservatif.

Zahro (2004), melakukan studi literatur pesantren khususnya kitab-kitab klasik (*kitab kuning*) yang membahas ilmu fiqh (*yurisprudensi Islam*) serta proses pengajarannya di pesantren. Menurutnya, ada dilema yang dihadapi beberapa pesantren besar yang telah merespon dan beradaptasi dengan sistem pendidikan modern (pendidikan universal *ala* negara), yaitu "tergusurnya" pengajian kitab kuning yang justru merupakan bahan/materi pokok *bahts al-masa'il* (instrumen pembahasan munculnya permasalahan sosial-keagamaan di masyarakat) bagi santri di kemudian hari. Berdasarkan temuannya bahwa permasalahan tersebut terjadi antara lain disebabkan dominasi kurikulum pemerintah atau pendidikan modern-sekuler, yang bersamaan itu masuknya murid-murid yang tidak berlatar belakang pendidikan pesantren. Akibat serius dari kondisi ini yaitu menurunnya sebagian besar santri dalam hal penguasaan kitab kuning.

Bruinessen (2004), dalam "*Traditionalist' and 'Islamist' Pesantrens in Contemporary Indonesia*" memberikan kesimpulan, tindakan radikal para alumni pesantren kebanyakan dipengaruhi oleh dua

hal, yaitu kurikulum dan budaya (praktik keagamaan) yang secara umum berkembang di lingkungan pesantren. Berdasarkan kurikulum yang diajarkan, pesantren di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pertama, pesantren yang secara ideologis berafiliasi ke *jam'iyah* NU. Pandangan keagamaannya sama dengan NU dan kurikulumnya menekankan ajaran fiqh Syafi'i dan etika sufistik serta kebanyakan dipimpin oleh kiai kharismatik. Kedua, pesantren yang secara ideologis berafiliasi dengan organisasi reformis. Fiqh yang diajarkan dilengkapi dengan *nas Al-Qur'an* dan Hadits Nabi SAW. Ketiga, pesantren yang berbeda jaringan dengan kedua tipe pesantren di atas, contohnya yaitu pesantren Al-Zaitun, Hidayatullah dan Al-Mukmin Ngruki. Pesantren Ngruki lebih dikenal dengan pesantren *salafi haraki*, yang di dalam kurikulumnya menekankan pelajaran *jihad* dan penegakan syariat Islam dalam kehidupan bernegara.

Azra & Afrianty (2005) dalam "*Pesantren and Madrasa: modernization of Indonesia muslim society*" menyimpulkan, salah satu faktor terpenting dalam keberlangsungan pesantren adalah kemampuan dalam mengakomodasi situasi yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan beberapa perbedaan mendasar. Pelajaran yang diutamakan dalam pendidikan pesantren adalah agama, sedangkan proses belajar mengajar dan urusan pengelolaan dipegang langsung oleh seorang ulama tradisional, yang di Jawa disebut kiai. Setidaknya ada tiga peranan peting pesantren dalam komunitas Muslim, yaitu: sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu agama, tempat melestarikan tradisi Islam dan mencetak kader ulama/kiai. Tujuan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, dan sekolah Islam) yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemajuan umat Islam. Aktivitas pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai agama dan etika-moral melalui kurikulum pendidikan modern sangat penting dan prospektif. Melalui lembaga pendidikan Islam tersebut peran penting untuk melakukan upaya modernisasi masyarakat Muslim di Indonesia akan mampu dipertahankan secara keseluruhan. Mengenai pelajaran kitab-kitab klasik (*kitab kuning*) Azra dan Afrianty (2005) tidak memasukkannya sebagai elemen dasar dari tradisi pesantren seperti yang telah disebutkan Dhofier (1994) di muka, karena lembaga pesantren yang berafiliasi kepada ormas reformis atau modernis kebanyakan tidak memakai *kitab kuning* sebagai referensi utama.

Zuhdi (2006), dalam "*Political and Social Influences on Religious School: A Historical*

Perspective on Indonesian Islamic School Curricula”, yang mengkaji beberapa model kurikulum pendidikan Islam di Indonesia menyimpulkan, ada hubungan timbal balik yang signifikan antara transformasi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tercermin dalam kurikulum pendidikan dengan perubahan sosial dan politik di Indonesia. Menurutnya, tuntutan sosial serta keputusan politik telah mempengaruhi orientasi lembaga pendidikan Islam yang dinilai sudah independen untuk mengembangkan diri dan melayani umat Muslim. Setidaknya dapat mempertahankan konstituen dalam rangka mendukung eksistensinya, lebih-lebih karena lembaga-lembaga pendidikan Islam semata-mata bergantung kepada dukungan orang tua murid (masyarakat). Keberlanjutan dan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam swasta tersebut patut mendapatkan apresiasi serta tanggapan positif untuk mempertahankan kualitas keimanan komunitas Muslim Indonesia. Menurut Zuhdi (2006), kondisi lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif bervariasi dalam bentuk kelembagaan, kurikulum dan pemaha-man keagamaan, --yang mencerminkan pula corak Islam sebagai agama dan pandangan hidup di kalangan umat Islam Indonesia yang manifestasinya juga beragam. Iklim perpolitikan nasional sangat mempengaruhi arah kebijakan pendidikan yang dikehendaki pemerintah. Dari periode ke periode pemerintahan, kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan Islam secara intens dipengaruhi sistem pendidikan nasional, sehingga pada akhirnya lembaga pendidikan pesantren semakin terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Fenomena ini terjadi baik pada pesantren tradisional maupun pesantren modern. Muncul tiga contoh kasus yang menunjukkan respon pendidikan Islam (pesantren) terhadap instrumentasi negara: (i) Mengakomodasi kurikulum pendidikan pemerintah lalu dikombinasikan dengan satuan kurikulum internal pesantren yang menjadi ciri khasnya; (ii) Tidak menggunakan kurikulum pemerintah karena menganggap lebih tepat kalau menggunakan kurikulum sendiri; dan (iii) Memberikan porsi yang seimbang antara kurikulum pemerintah dan satuan kurikulum internal pesantren supaya kedua-duanya dapat diimplementasikan dengan baik.

Nasir (2010) yang melakukan penelitian di empat pesantren di Jombang. Dengan *multi-case studies* ini ia menyimpulkan, bahwa sikap terbuka pesantren (kiai) dengan dunia luar, misalnya dalam penyelenggaraan unit-unit pendidikan formal di lingkungan pesantren telah berakibat pada pergeseran nilai: (i) kiai tidak lagi menjadi tumpuan

sumber belajar dan rujukan moral, dan (ii) pesantren tidak hanya dipandang sebagai tempat mengabdikan tetapi sekaligus tempat mencari ijazah dan *ma'isyah* (sumber pendapatan) bagi sebagian ustadz/guru. Namun demikian, fakta tersebut menunjukkan lembaga pesantren memiliki daya elastisitas yang tinggi dan pandangan terbuka dengan ide-ide perubahan. Nasir juga memberikan kesimpulan seperti yang ditemukan Mastuhu (1984) maupun Soebandar (2013), bahwa pola kepemimpinan yang sesuai dengan perkembangan pesantren adalah pola kepemimpinan yang rasional dan bersifat kolektif, dengan alasan tingkat partisipasi komunitas lebih tinggi serta organisasinya juga lebih kompleks, maka sentral kepemimpinan tidak mengarah kepada individu melainkan lebih mengarah pada institusi serta melalui mekanisme kelembagaan yang diatur dengan sistem manajerial yang modern.

Soebandar (2013), yang meneliti pola suksesi dan kepemimpinan di lima pesantren di pulau Madura memberikan kesimpulan, di samping mencerminkan visi misi kepemimpinan kiai, pada umumnya pola inovasi sistem pendidikan yang dikembangkan di tiap-tiap pesantren dirancang berdasarkan keragaman santri seperti latar belakang, bakat, minat, faktor kemampuan individu dan sebagainya. Menurutnya, proses transformasi kepemimpinan di pesantren lebih ditekankan pada aspek kompetensi dan menjadi syarat utama dalam suksesi kepemimpinan di pesantren. Kompetensi figur pemimpin pondok pesantren diukur dari kharisma, kualitas keilmuan, kepribadian, keterampilan manajerial, dan keikhlasan untuk menerima amanah. Tetapi, belum pernah muncul iklim yang tepat yang menjadi tempat persemaian kompetensi kepemimpinan di lembaga pesantren. Berdasarkan pengalaman selama ini, terjadinya alih kepemimpinan di pesantren berlangsung secara alami, yakni seiring wafatnya kiai *sepuh* (pengasuh utama). Belum pernah terjadi suksesi kepemimpinan ketika kiai *sepuh* masih hidup. Adapun terkait masalah pembaruan pesantren, penulis berbeda pendapat dengan Horikosi (1987) maupun Ziemek (1986) yang mengatakan, setiap tawaran inovasi yang datang dari luar sering direspon dunia pesantren secara dilematis. Ia tegaskan, bahwa muncul keengganan antara melestarikan nilai-nilai lama atau mengembangkan nilai-nilai yang sama sekali baru, dan atau memadukan di antara keduanya.

Adopsi model modern metode pengajaran dan kurikulum madrasah relevan dengan situasi sistem pendidikan Muslim di awal abad ke-20. Tujuan

integrasi adalah agar santri siswa yang mempelajari ilmu agama tidak tahu apa pun tentang ilmu sosial-alam, sedangkan mereka yang belajar ilmu sosial-alam tidak memiliki pengetahuan agama yang memadai.

Selain itu, integrasi pendidikan sebagaimana dicatat oleh Jones, peran pondok pesantren dalam menjembatani kesenjangan tidak hanya antara elit dan petani miskin, tetapi juga antara hal-hal ilahi dan duniawi, antara urusan duniawi dan akhirat. Menurut Jones menekankan peran penting yang dimainkan oleh pondok pesantren dalam menjaga stabilitas sosial dengan membangun dan menjaga keseimbangan perbedaan status sosial. Sistem unik pondok pesantren tidak ada bandingannya dengan sistem pendidikan sekuler, terutama dalam menanamkan semangat kehidupan (Jones, 1991).

Keunggulan pendidikan pesantren sebagaimana dicatat oleh George Quinn adalah belajar Islam di sekolah pesantren adalah pengalaman yang berkembang dengan pikiran. Jauh dari mempersempit pandangan mereka tentang dunia, itu membuat mereka berhubungan dengan keragaman negara mereka sendiri dan membuka jendela pada dunia jauh di luar Indonesia ... mereka tidak mengabaikan tatanan global 'lain' itu. Banyak siswa telah memperoleh perintah bahasa Inggris yang lumayan. Mereka berpengetahuan dan bahkan antusias tentang olahraga dan budaya populer Barat. Mereka tahu lebih banyak tentang dunia Eropa dan Amerika yang sekuler dan Kristen, daripada rata-rata siswa Australia yang tahu tentang dunia Islam" (Zarkashi, 2015). Catatan Lance Castles (1996) setelah penelitiannya selama tiga bulan di pondok pesantren Gontor mengemukakan bahwa para siswa pesantren berbeda dari mereka yang tidak belajar di pondok pesantren dalam semangat hidup mereka karena mereka membayangkan bahwa hidup adalah perjuangan, baik dalam ekonomi maupun dalam berkhidmat kepada agama.

Kesimpulan

Keseluruhan paparan dapat kemudian disimpulkan bahwa: (1) Nilai-nilai yang dikembangkan oleh Pondok Gontor dalam membentuk karakter santri terdiri dari lima nilai yang disebut pancajawa pondok, nilai tambah adalah ketulusan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan berdasarkan semangat agama, dan kebebasan. Selain itu, Pondok Gontor juga mengembangkan moto seperti: berpikiran tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikir bebas; (2) Nilai-nilai modern diimplementasikan

baik dalam proses pembelajaran, pembentukan budaya pesantren, kegiatan ko-kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, dapat diumumkan bahwa Pondok Gontor adalah lembaga pendidikan agama yang membutuhkan pendidikan karakter sepanjang proses pendidikan mulai dari proses pembelajaran, manajemen sekolah asrama, dan kegiatan sehari-hari siswa.

Daftar Pustaka

- Asrori, S. Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme dan Ekstremisme di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4 (1). 2019.
- _____. "Negosiasi Ruang Publik: Modernisasi Dan Penguatan Civil Society Model Pesantren." *Kordinat; Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16.1 (2017): 159-176.
- Azra, Azyumardi, Dina Afrianty, and Robert W. Hefner. "Pesantren and madrasa: Muslim schools and national ideals in Indonesia." *Schooling Islam: The culture and politics of modern Muslim education* (2007): 172-98.
- Azra, Azyumardi. *Democratizing and Growing Indonesia: Ties between Japan, the West, and the Islamic World*, Presented at public Lecture, The Fukuoka Foundation, ACROS Fukuoka, 21 September 2014
- Bayat, Asef, ed. *Post-Islamism: The Many Faces of Political Islam*. Oxford University Press, 2013.
- Brown, Nathan J. *Post-revolutionary al-Azhar*. Vol. 3. New York, Carnegie Endowment for International Peace, 2011, h. 11
- Bruinessen, Martin Van. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*. Institute of Southeast Asian Studies, 2013.
- Bull, Ronald Alan Lukens. *A Peaceful Jihād: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction*. *Dissertation*. Arizona State University, 1997.
- Castles, Lance. "Note on Islamic School at Gontor, translated by Hamid Fahmy Zarkasyi." *Gontor, sebuah catatan lama tentang sekolah Islam* (1996).
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES, 2011
- Jahroni, Jajang. "The Political economy of knowledge: salafism in post-Soeharto urban Indonesia", *Dissertation*, Boston University, 2015

- Jones, Sidney. "The Javanese Pesantren: between elite and peasantry." *Reshaping local worlds: formal education and cultural change in rural Southeast Asia* (1991): 19-41.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI
- Qaraḍāwī, Y. *Islamic awakening between rejection and extremism*. The Other Press. 2010
- Schwedler, J. M.. *Faith in moderation: Islamist parties in Jordan and Yemen*. Cambridge University Press. 2006.
- _____. "Can Islamists become moderates? Rethinking the inclusion-moderation hypothesis." *World Politics* 63.2 (2011): 347-376.
- Shihab, Quraish. *Wasatiyah Islam* (Ciputat, Lentera Hati, 1999)
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. *Gontor & pembaharuan pendidikan pesantren*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2005.
- _____. *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*. Trimurti Press, 2005.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Modern pondok pesantren: Maintaining tradition in modern system." *TSAQAFAH* 11.2 (2015): 223-248.
- Zuhdi, Muhammad. "Challenging moderate Muslims: Indonesia's Muslim schools in the midst of religious conservatism." *Religions* 9.10 (2018): 310.